

Vol. 11, Juni 2016

ISSN 1978-7219

# Lingua Humaniora

Jurnal Bahasa dan Budaya

Diterbitkan oleh

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lingua Humaniora	Vol. 11	Hlm. 951—994	Juni 2016	ISSN 1978-7219
------------------	---------	--------------	-----------	----------------

# Lingua Humaniora

Jurnal Bahasa dan Budaya

**L**INGUA HUMANIORA: Jurnal Bahasa dan Budaya merupakan media informasi dan komunikasi ilmiah bagi para praktisi, peneliti, dan akademisi yang berkecimpung dan menaruh minat serta perhatian pada pengembangan pendidikan bahasa dan budaya di Indonesia yang meliputi bidang pengajaran bahasa, linguistik, sastra, dan budaya. *Lingua Humaniora*: Jurnal Bahasa dan Budaya diterbitkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Redaksi menerima tulisan dari pembaca yang belum pernah dimuat di media lain. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiran (telaah) yang sesuai dengan visi dan misi *Lingua Humaniora*. Setiap naskah yang masuk akan diseleksi dan disunting oleh dewan penyunting. Penyunting berhak melakukan perbaikan naskah tanpa mengubah maksud dan isi tulisan.

## Penanggung Jawab Umum

Dr. Luizah F. Saidi

## Penanggung Jawab Kegiatan

Teguh Santoso, M.Hum.

Joko Isnadi, S.E., M.Pd.

## Mitra Bestari

Dr. Felicia N. Utorodewo (Universitas Indonesia)

Katubi, APU. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

## Ketua Dewan Redaksi

Gunawan Widiyanto, M.Hum.

## Sekretaris Redaksi

Ririk Ratnasari, M.Pd.

## Anggota Dewan Redaksi

Dr. Abdul Rozak

Dr. Widiatmoko

## Penata Letak dan Perwajahan

Yusup Nurhidayat, S.Sos.

## Sirkulasi dan Distribusi

Djudju, S.Pd.

Subarno

# Lingua Humaniora

Jurnal Bahasa dan Budaya

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	v
Perbandingan Struktur Klausa Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia [Dedi Supriyanto] .....	951—959
Kualitas Terjemahan Novel <i>Eclipse</i> Karya Stephenie Meyer dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia [Tri Pujiati] .....	960—968
Analisis Wacana Kritis Misrepresentasi Teks Berita dalam Surat Kabar [Anggia Pratiwi dan Janiko] .....	969—985
Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel <i>Serial Anak-Anak Mamak</i> Karya Tere-Liye [Endah Ariani Madusari] .....	986—994

# ANALISIS WACANA KRITIS MISREPRESENTASI TEKS BERITA DALAM SURAT KABAR

**Anggia Pratiwi**  
**Janiko**  
STKIP YPM Bangko Jambi  
*uknow\_gie@yahoo.co.id*

## ABSTRACT

This research aims to describe the strategy of misrepresentation used by journalists in the news. The object of this research is the news text of Radar Sark. The data is collected by documentation technique dan analyzed qualitatively by using content analysis. The result of research indicates that misrepresentation is used in the news text with the strategy being either excommunication, marginalization, exclusion, or delegitimation.

**Keywords:** *misrepresentation, text news, critical discourse analysis*

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi misrepresentasi yang digunakan oleh jurnalis pada teks berita. Objek penelitian ini adalah teks berita pada surat kabar *Radar Sarko*, yang sebelumnya telah melalui proses sampling dengan teknik sampling purposif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi misrepresentasi digunakan dalam teks berita, baik dalam strategi ekskomunikasi, marginalisasi, eksklusi, maupun delegitimasi.

**Kata kunci:** *misrepresentasi, teks berita, analisis wacana kritis*

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan medium komunikasi yang digunakan individu untuk menyampaikan pesan, informasi, dan jalan pikirannya kepada orang

lain, baik komunikasi lisan maupun tertulis dan apapun profesi dari individu tersebut, termasuk profesi jurnalis. Seorang jurnalis menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada khalayak pembaca. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan fakta, data, sumber, dan bukti yang aktual dan akurat. Apabila seorang jurnalis memberitakan tanpa dasar yang jelas dan akurat, dapat disimpulkan jurnalis tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik seorang jurnalis adalah bahwa jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar sosial lainnya. Artinya, dalam menginformasikan berita seorang jurnalis harus bersikap netral, menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan data yang terbukti kebenarannya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Hal tersebut juga tercantum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yakni bahwa wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti informasi, serta tidak melakukan plagiasi. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan berbeda terutama pada media surat kabar di Kabupaten Merangin.

Di wilayah ini masih ditemukan surat kabar dengan berita yang memarginalkan pelaku pemberitaan. Jurnalis cenderung tidak netral dalam menulis berita sehingga mengakibatkan ketidakbenaran penggambaran atau misrepresentasi. Akibatnya, masyarakat sebagai khalayak pembaca menjadi bingung sehingga terjadi kesalahan memaknai sebuah berita. Sebagian pembaca hanya terfokus membaca materi-materi dalam teks berita tanpa memahami lebih jauh maksud berita tersebut dan dengan mudah menerima informasi tersebut tanpa menguji kebenarannya. Untuk mengungkap kebenaran di balik teks-teks berita tersebut, perlu dilakukan analisis wacana kritis. Analisis ini mengungkap strategi misrepresentasi yang digunakan oleh seorang jurnalis dalam menyampaikan pemberitaan di media surat kabar dan upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari seorang jurnalis yang menulis teks berita.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Analisis isi digunakan untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah dengan memerhatikan konteksnya. Metode ini menekankan kejelasan isi teks secara kualitatif dan makna isi teks, pembacaan simbol-simbol yang muncul pada teks, dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam teks tersebut. Analisis isi amat efisien untuk menginvestigasi isi media, baik yang tercetak maupun yang berbentuk *broadcast*. Secara teknik, analisis isi mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang yang digunakan dalam teks, menggunakan kriteria atau kategori dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi (Bungin, 2008:159).

Objek penelitian adalah teks berita dalam surat kabar *Radar Sarko* Edisi Maret - September 2014 dan *Merangin Ekspres* Edisi Maret - Mei 2015. Teknik *sampling* digunakan untuk menentukan objek atau data atau sampel mana yang akan digunakan (Sugiyono, 2008:217). Hal ini bertujuan agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian jika data mentah yang ditemukan cukup besar jumlahnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penyampelan dilakukan menggunakan lot dengan menulis nomor urut untuk setiap teks berita yang ditemukan dan diunduh secara daring. Hal ini dilakukan untuk menentukan teks berita mana yang kemudian dimasukkan ke dalam sampel. Nomor urut yang keluar atau yang terpilih melalui lot merupakan data yang dipilih untuk dianalisis. Data dikumpulkan dengan jalan membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan data dari teks berita dari media surat kabar dan media daring.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan penelusuran data daring. Data berbentuk kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan dalam teks berita. Teknik dokumentasi digunakan karena media cetak Merangin tersebut belum memiliki situs daring resmi sedangkan untuk surat kabar *Merangin Ekspres* digunakan teknik pengumpulan data secara daring. Tahapan meliputi (1) membaca dan memahami teks berita yang dibaca dan diunduh melalui media surat kabar dan daring di internet yang dipilih sebagai objek penelitian dan (2) melakukan pencatatan data primer. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pencatatan tertentu yang sengaja dibuat un-

tuk keperluan pencarian data tersebut. Selanjutnya, menandai dan mencatat data berupa tuturan-tuturan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang ditemukan dalam teks berita berdasarkan faktor-faktor penentu peristiwa tutur menurut Hymes (konteks nonlinguistik) pada lembar formulir pencatatan yang telah dibuat.

Analisis isi didahului dengan melakukan pengodean terhadap data berupa penggunaan kata dan kalimat yang relevan atau yang paling banyak muncul dalam teks berita. Dalam pengodean juga dicatat konteks yang melatarbelakangi sehingga istilah-istilah tersebut muncul di dalam teks. Pencatatan tersebut didasarkan pada faktor-faktor penentu peristiwa tutur menurut Hymes pada lembar pengumpulan atau pengkodean data yang telah dibuat (*coding sheet*).

Selanjutnya, dilakukan klasifikasi terhadap pengodean. Klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan strategi misrepresentasi dengan menggunakan dua tabel pengelompokan data yang berbeda kategori (lembar pengodean), yakni tabel pengelompokan strategi misrepresentasi (Eriyanto: 2006). Setelah data diproses, diinterpretasikan maknanya. Pada tahap ini disimpulkan hasil analisis dan interpretasi data untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan misrepresentasi dalam teks berita.

## HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

### **Strategi Misrepresentasi Kategori Ekskomunikasi**

Strategi misrepresentasi yang digunakan dalam teks berita pada *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres* berkategori ekskomunikasi. Ekskomunikasi berhubungan dengan cara seseorang atau suatu kelompok dikeluarkan dari pembicaraan publik. Dalam wacana teks berita misalnya, misrepresentasi terjadi karena seseorang atau suatu kelompok tidak diperkenankan berbicara. Seseorang atau suatu kelompok tersebut dianggap asing, tidak ada kebutuhan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikannya. Topik pemberitaan hanya terfokus pada satu pelaku sosial, sedangkan pelaku sosial yang ikut terlibat hanya dianggap pelengkap berita. Berikut contoh teks berita yang berkategori ekskomunikasi pada surat kabar *Radar Sarko*.

Namun demikian, diakuinya Bupati Merangin Al Haris didampingi Kepala Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan sudah meninjau kios tersebut. Bahkan para pedagang sempat berbincang dengan Bupati. Mendengar keluhan itu Bupati dengan menyampaikan ke Kadis tersebut untuk segera memperbaiki pintu yang rusak. “Pak Haris sudah melihat kios ini, kami sempat berbincang dengan beliau. Kami ceritakan tentang pintu kios tempat kami jualan yang rusak. Bupati langsung tanggap. Dan beliau menitipkan pesan ke Kadis Dinas Tata Kota, agar segera memperbaiki pintu kios tersebut. ***Saat itu, Kadis Tata Kota bilang ‘iya’. Namun sampai sekarang pintu kios belum juga diperbaiki.***” *Keluhnya.*

Kutipan teks berita di atas berjudul *Pintu Rusak, Peralatan Hilang*, yang di dalamnya terdapat tiga pelaku sosial, yakni Bupati Al Haris, para pedagang kios, dan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin. Pelaku sosial yang lebih disorot adalah bupati dan pedagang kios, sedangkan kepala dinas tidak begitu disorot. Hal tersebut dibuktikan pada kalimat terakhir yang bercetak tebal. Kalimat tersebut bukanlah pernyataan langsung dari pelaku sosial yang dianggap memiliki wewenang untuk memperbaiki pintu kios yang rusak, melainkan pernyataan pedagang kios yang mengeluhkan keadaan pintu kiosnya.

Jika jurnalis memegang teguh kode etik, kutipan teks berita tersebut tidak hanya terfokus pada dua pelaku sosial, tetapi juga melibatkan seluruh pelaku sosial. Jika jurnalis mengonfirmasi kembali keluhan yang dialami oleh pedagang kios mengenai pintu yang rusak kepada pihak dinas tata kota, masyarakat sebagai khalayak umum terutama pedagang kios bisa mengetahui alasan dinas tata kota belum menindaklanjuti masalah rusaknya pintu kios tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Kategori ekskomunikasi juga ditemukan dalam surat kabar *Merangin Ekspres*. Berikut kutipan teks beritanya.

Sejak dua tahun terakhir, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) Kabupaten Merangin sudah tidak melakukan pendataan kerusakan hutan. ***Sehingga tidak diketahui berapa luas kawasan hutan yang telah dirambah oleh masyarakat.***

Kutipan teks berita di atas berjudul *Kerusakan Hutan tidak Terdata*. Di dalamnya terdapat tiga pelaku sosial, yakni Kepala Dinas Perkebunan dan Ke-

hutan Kabupaten Merangin, Arwan dan Kabid Reboisasi dan Perlindungan Hutan, Ridwan serta masyarakat Kabupaten Merangin. Fokus pemberitaannya lebih pada dua pelaku sosial dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan, sedangkan masyarakat Merangin sebagai pelaku sosial ketiga hanya sebagai pelengkap dan hanya dijadikan pelaku kerusakan hutan oleh pelaku sosial pertama dan kedua.

Masyarakat Merangin sebagai pelaku sosial ketiga tidak diberi kesempatan menjelaskan alasan melakukan kerusakan hutan yang dilindungi oleh Pemkab Merangin. Selanjutnya, identitas masyarakat Merangin pada kutipan teks berita tersebut juga tidak dideskripsikan secara jelas. Jadi, hanya digunakan istilah masyarakat secara umum. Seharusnya, jurnalis yang meliput berita tersebut melaksanakan kode etik, yakni hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Jika informasi yang disampaikan tidak jelas sumber fakta dan pendapat yang diperolehnya, hal itu bisa menimbulkan opini yang tidak menyenangkan di khalayak masyarakat.

### **Strategi Misrepresentasi Kategori Eksklusi**

Penggunaan strategi misrepresentasi kategori eksklusi pada teks berita dalam surat kabar *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres* teridentifikasi 18 data. Kategori eksklusi merupakan kategori misrepresentasi yang mencoba menggambarkan pelaku sosialnya secara buruk walaupun pelaku sosial tersebut diberi kesempatan untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Kategori eksklusi digunakan pada teks berita dalam *Radar Sarko*. Berikut contoh kutipan teks berita dengan judul *Proyek Disdik Terendus Dimonopoli*.

... *“Katanya sih begitu, sejumlah proyek yang ada di tubuh Disdik tak sedikit dikuasai kontraktor berinisial H. Rid. Sah-sah saja memang, akan tetapi semestinya kue paket yang ada di tubuh Disdik Merangin tersebut, bisa sedikit dibagi rata Disdik dengan rekanan yang lain. Sehingga para kontraktor berkantong tipis bisa diberi kesempatan untuk berkarya di Merangin.”* Ungkap salah seorang kontraktor Cah yang minta namanya diinisialkan saja kepada Koran ini kemarin.

Pada kutipan teks berita di atas ada tiga pelaku sosial, yakni CAH (kontraktor yang disamarkan namanya), H. Rid (kontraktor yang disamarkan namanya),

dan Masroni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Kutipan tersebut menyampaikan ketidakpuasan beberapa kontraktor di Kabupaten Merangin yang diwakili oleh CAH atas kebijakan dinas pendidikan yang tidak adil dalam membagikan *paket kue proyek*. Dinas pendidikan dianggap lebih mengutamakan satu kontraktor yakni H. Rid untuk menguasai proyek di Dinas Pendidikan Merangin. H. Rid sebagai pelaku sosial kedua dimintai keterangan mengenai hal tersebut, tetapi membantah tuduhan dari rekan kontraktornya. Bahkan, pihak dinas pendidikan juga membantu menjernihkan masalah tersebut bahwa terdapat kesalahpahaman antarkontraktor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

Walaupun pelaku sosial kedua dan ketiga membantah tuduhan tersebut, pelaku sosial pertama yakni CAH tetap bersikukuh dengan apa yang dituduhkan. Hal tersebut terlihat pada teks kutipan berita berikut ini.

*“Kalau mau tahu berapa jumlah proyeknya, Tanya saja langsung terhadap Disdik yang jelas ada banyak paket kue proyek yang dikuasai H. Rid saat ini. Kuat dugaan berhasilnya H. Rid menembus pilar di tubuh Disdik tersebut tak terlepas adanya permainan tak sehat alias kong kalikong yang terjadi antara H. Rid dengan pihak Disdik,”* tambah Cah lagi.

Kategori eksklusif lebih banyak ditemukan pada teks berita pada *Merangin Ekspres*. Berikut kutipan teks beritanya.

Poin lain yang dalam daftar tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut, yakni *tudingan mengenai buruknya pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) disebagian besar wilayah tersebut*. Terkait layanan PLN, dirinya menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh kelalaian petugas catat meter, sebab menurutnya belakangan ini banyak sekali warga yang mengaku, bahwa di rumahnya tidak pernah ada petugas catat meter yang datang. Sudah sangat banyak sekali warga yang mengeluh, tagihan listrik membengkak, bahkan ada yang sampai dua kali lipat kenaikannya,” ungkap Fu'ad lagi.

Kutipan teks berita di atas berjudul *Merasa Seperti Dianak Tirikan, Hari ini warga Tabir akan Demo*. Di dalamnya terdapat empat pelaku sosial, yakni pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolres Merangin AKBP Munggaran Kartayuga dan Kasat Intel AKP Johan, Muhammad Fuadi sebagai koor-

dinator demo, dan pihak PLN sebagai pelaku sosial ketiga serta Pemkab Merangin. Teks berita tersebut menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan warga Tabir atas berbagai kebijakan Pemkab Merangin yang belum maksimal mengembangkan wilayah Tabir, misalnya pembangunan infrastruktur, penempatan pejabat teras, dan layanan PLN. Namun, yang lebih digambarkan secara buruk dalam teks berita adalah pelaku sosial ketiga yakni pihak PLN.

Masyarakat Tabir menganggap pelayanan yang diberikan PLN tidak memuaskan. Bahkan, tagihan PLN masyarakat membengkak tanpa alasan yang jelas. Pihak PLN telah dimintai keterangan. Namun, keterangan yang telah diperoleh tersebut tetap tidak mampu meredam ketidakpuasan masyarakat Tabir. Berikut kutipan teks beritanya.

*Terkait layanan PLN, dirinya menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh kelalaian petugas catat meter sebab menurutnya belakangan ini banyak sekali warga yang mengaku, bahwa di rumahnya tidak pernah ada petugas catat meter yang datang.*

Sudah sangat banyak sekali warga yang mengeluh, tagihan listrik membengkak, bahkan ada yang sampai dua kali lipat kenaikannya,” ungkap Fu’ad lagi. *Lebih lanjut, Fuad membeberkan, di wilayah kecamatan Tabir sendiri, warga yang mengaku sangat mengeluhkan pembengkakkan tagihan listrik, setidaknya sudah mencapai ratusan pelanggan. Ini baru di Tabir saja, saya dengar di daerah lain juga ada keluhan yang sama,” imbuhnya.*

Terlepas dari pemberitaan di atas, yang menyampaikan keluhan adalah masyarakat Tabir. Seharusnya jurnalis juga menggali fakta dan informasi lebih dalam mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Keluhan-keluhan yang dijadikan pemberitaan tersebut seharusnya dikonfirmasi kembali kepada pelaku sosial yang terlibat, seperti pihak PLN dan Pemkab Merangin. Hasil konfirmasi tersebut diberitakan secara berimbang dengan hasil dari informasi sebelumnya. Dengan demikian, masyarakatlah sebagai khalayak umum yang menilai mana pelaku sosial yang salah.

### **Strategi Misrepresentasi Kategori Marjinalisasi**

Ada empat jenis marjinalisasi, yakni eufemisme, disfemisme, labelisasi, dan stereotip. Keempat jenis marjinalisasi tersebut masing-masing berbeda dalam penggunaannya, terutama dalam wacana teks berita. Dari keempat jenis marjinalisasi tersebut, eufemisme diidentifikasi lebih banyak digunakan dalam teks berita pada *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres*. Eufemisme adalah salah satu praktik penggunaan bahasa sebagai strategi wacana dari marjinalisasi yang bertujuan menghaluskan makna bahasa yang akan digunakan jurnalis dalam menulis teks beritanya. Eufemisme merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh media (Eriyanto, 2006:126).

Pada surat kabar *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres*, ditemukan 71 data yang menggunakan eufemisme dalam menyampaikan beritanya. Hal ini karena eufemisme lebih cocok digunakan untuk menggambarkan tindakan pelaku sosial secara individu/kelompok/lembaga kepada masyarakat ke bawah (Eriyanto, 2006:125). Apalagi, pemberitaan di media cetak dan elektronik lebih banyak menyetengahkan permasalahan yang berdampak pada masyarakat. Berikut contoh kutipan teks berita yang diidentifikasi menggunakan eufemisme.

Salah satu dokter yang tidak ingin disebutkan namanya, *secara terang-terangan mengatakan sistem kapitasi yang hendak diterapkan bagi dokter di layanan kesehatan primer (Puskesmas) bisa membuat dokter 'tekor'. Kondisi ini terkait berkurangnya pendapatan dokter meski jumlah pasien meningkat.*

Kutipan teks berita yang diterbitkan surat kabar *Radar Sarko* di atas berjudul *Dokter Keluhkan Sistem Kapitasi*, dengan pelaku sosial adalah dokter OZ (nama disamarkan) yang mengeluhkan sistem kapitasi sejak pemberlakuan BPJS. Sistem kapitasi tersebut dianggap memengaruhi metode pembayaran jasa dokter yang telah melaksanakannya dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, penerapan sistem tersebut membuatnya tidak mendapat keuntungan dalam melaksanakan tugasnya. Padahal, dokter itu berharap mendapatkan penambahan hasil pendapatan selain gaji yang diterima setiap bulannya.

Bagi masyarakat umum, istilah sistem kapitasi tidak akan dipahami secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya tentang makna kapitasi. Untuk membantu masyarakat memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata “tekor” yang berarti rugi. Penggunaan kata ini dipilih karena ia lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari daripada kata “rugi”. Sementara itu, kata “rugi” dianggap tidak tepat digunakan karena dianggap kasar. Menurut jurnalis, pemakaian kata “rugi” berkonotasi negatif bahwa dokter yang memberi pelayanan kesehatan tidak ikhlas membantu masyarakat.

Selanjutnya, pada surat kabar *Merangin Ekspres* juga ditemukan penggunaan eufemisme. Berikut contoh kutipan teks beritanya.

Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin untuk mendeteksi tingkat pencemaran lingkungan, tampaknya tidak sesuai dengan kelengkapan alat Labor di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), pasalnya labor yang ada *tidak memiliki akreditasi*. Kita punya alat labor, kita bisa melakukan pengecekan. *Tapi hasilnya tak bisa kita pertanggungjawabkan, kata Irdam*, Kepala BLHD Merangin. Hasil pengecekan laboratorium, dikatakan Irdam, *tidak mempunyai kekuatan hukum*. Hal ini dikarenakan laboratorium yang dimiliki BLHD belum memiliki *sertifikat akreditasi*. *Labor kita belum punya sertifikat akreditasi. Makanya tidak mempunyai kekuatan hukum, katanya*.

Dalam kutipan teks berita di atas terdapat praktik wacana eufemisme, sebagaimana dalam “tapi hasilnya tak bisa kita pertanggungjawabkan” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” yang ditujukan pada Laboratorium di Badan Lingkungan Hidup dan Daerah Kabupaten Merangin. Melalui penggunaan bahasa tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada masyarakat terutama Pemkab Merangin bahwa selama ini kinerja pemerintah belum mencapai target. Misalnya adalah dalam mendapatkan akreditasi untuk Labor BLHD. Mengingat Labor BLHD memiliki peralatan yang lengkap dan teknisi yang berpengalaman di bidangnya, sayang sekali jika belum terakreditasi dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Padahal, proses akreditasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak BLHD jika serius meningkatkan kinerja di bidangnya.

Digunakan juga disfemisme yakni pemakaian bahasa pengasaran. Disfemisme dapat mengakibatkan realitas menjadi kasar (Eriyanto, 2006:125—207). Disfemisme umumnya sering digunakan untuk menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat bawah, seperti yang terlihat pada kutipan teks berita berikut ini.

Keberadaan salon di Kota Bangko disinyalir kuat sering dijadikan tempat *prostitusi* terselubung. '*Manisnya*' bisnis yang mengedepankan kecantikan tersebut diduga tidak hanya melakukan '*servis*' terhadap tubuh pelanggan. Akan tetapi juga memberikan layanan '*tambahan*'.

Judul berita kutipan teks di atas adalah *Diduga Salon Jadi Tempat Prostitusi*, diterbitkan oleh surat kabar *Radar Sarko*. Melalui kutipan tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin bahwa tidak semua salon kecantikan di wilayah ini legal. Salon tidak hanya memberikan pelayanan kecantikan tetapi juga pelayanan prostitusi.

Jurnalis menggunakan istilah "prostitusi" bagi salon yang menjadi pelaku sosial dalam kutipan teks berita tersebut. Istilah ini digunakan oleh individu atau kelompok yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui pelayanan seks secara ilegal. Hal tersebut hanya dilakukan bagi seseorang atau kelompok tertentu yang membutuhkan uang atau seseorang atau kelompok tertentu yang dikategorikan masyarakat bawah. Namun, ternyata pada praktiknya disfemisme digunakan tidak hanya untuk masyarakat bawah tetapi juga untuk kalangan kelas atas seperti pejabat pemerintahan, sebagaimana contoh kutipan teks berikut.

"Kalau Bupati ada di tempat, semua pejabat hadir, bahkan parkir di kantor Pemkab sampai tidak cukup. Tapi saat Bupati keluar, pejabat menghilang. Ini kan ciri-ciri *pejabat cari muka*," kata Masduki yang juga aktivis dari LSM Papinhas Merangin.

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar *Radar Sarko* dengan judul *Awas, Pejabat Cari Muka*. Jurnalis menggunakan kata "pejabat cari muka" yang ditujukan kepada pejabat Pemkab Merangin. Kata tersebut memiliki konotasi tidak baik, yang artinya bahwa pejabat di Kabupaten Merangin tidak

tulus melaksanakan kewajibannya. Jadi, kutipan teks berita tersebut memban-  
tah pendapat Eriyanto sebelumnya yang menyatakan disfemisme hanya untuk  
kategori masyarakat bawah.

Berikutnya, kategori labelisasi juga ditemukan dalam teks berita pada surat  
kabar *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres*. Praktik wacana labelisasi adalah pe-  
rangkat bahasa yang digunakan oleh mereka yang berada di kelas atas untuk  
menundukkan lawan-lawannya (Eriyanto, 2006:126). Praktik ini hampir sama  
dengan praktik wacana disfemisme. Namun, labelisasi dapat langsung teriden-  
tifikasi ketika ditemukan pemberian “sebutan” atau “julukan” pada pelaku so-  
sial yang dianggap berkedudukan rendah oleh pelaku sosial yang berkeduduk-  
an tinggi. Selain itu, labelisasi adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada  
individu, kelompok, atau kegiatan. Berikut contoh kutipan teks beritanya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kini telah berganti nama menjadi Badan  
Layanan Umum Daerah (BLUD) ***Kabupaten Merangin kembali meluncurkan  
proyek “siluman” dengan omset milyaran.***

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar *Radar Sarko* de-  
ngan judul *Ada Proyek Siluman di RSUD*. Dari judul itu, dapat segera dike-  
tahui bahwa jurnalis menggunakan labelisasi dalam tulisannya. Hal tersebut  
terlihat pada penggunaan kata “siluman” pada judul berita dan kalimat pada  
teks berita, yakni “Kabupaten Merangin kembali meluncurkan proyek ‘silu-  
man’ dengan omset milyaran.” Jurnalis ingin menyampaikan kepada masyara-  
kat Merangin bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Merangin sedang melak-  
sanakan proyek pembangunan yang tidak jelas, tidak ada transparansi dalam  
pelaksanaannya.

Jika mengutip kembali pendapat Eriyanto mengenai praktik wacana label-  
isasi yang digunakan oleh kalangan atas untuk menundukkan lawan-lawannya,  
contoh kutipan teks berita tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Pemerin-  
tah Kabupaten Merangin sebagai pelaku sosial dari kalangan atas justru yang  
diberi label oleh jurnalis yang ditunjukkan dengan penggunaan kata “siluman.”  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa labelisasi tidak hanya dapat digunakan bagi ka-  
langan atas, tetapi juga oleh kalangan masyarakat bawah.

Praktik wacana terakhir dalam strategi misrepresentasi kategori marjinalisasi adalah stereotip. Stereotip adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (tetapi umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan (Eriyanto, 2006:126). Selanjutnya, stereotip merupakan praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif.

Penggunaan stereotip ini hanya ditemukan dalam surat kabar *Merangin Ekspres*. Berikut contoh kutipan teks beritanya.

Tidak dilakukannya tindakan terhadap mobil itu, dikatakan Makmur, karena sampai saat ini mobil tersebut masih tanggung jawab pihak kontraktor yang memenangkan tender pengadaan mobil Damkar, yakni CV Adi Putra Bungsu. "Masa pemeliharaan Mobil tersebut selama satu tahun, artinya sampai sekarang masih merupakan tanggung jawab pihak kontraktor, itulah mengapa saya ketika masih di sana (Kepala BPBD), tidak mengupayakan perbaikan mobil tersebut," terang Makmur. ***Bahkan dikatakan Makmur, sejak mobil tersebut rusak sekitar beberapa bulan lalu, dirinya telah beberapa kali menghubungi pihak CV Adi Putra Bungsu. Namun hingga saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak CV Adi Putra Bungsu, yang disebutnya sebagai pihak yang masih bertanggungjawab sepenuhnya. "Saya sudah beberapa kali menghubungi pihak kontraktor, namun tidak ada tanggapan, buktinya sampai sekarang ini belum diperbaiki juga," lanjut makmur lagi.***

Kutipan teks berita di atas berjudul *Kontraktor Paling Bertanggung Jawab, Terkait Rusaknya Mobil Damkar*. Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah kontraktor yang memanfaatkan mobil Damkar untuk proyek yang sedang dikerjakannya. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang bercetak tebal dan dimiringkan. Melalui paragraf tersebut, pihak Damkar mendeskripsikan kontraktor yang menggunakan mobil Damkar tersebut secara buruk dengan memberitakan bahwa ketika mobil tersebut masih dalam tanggung jawab kontraktor, mobil tersebut tidak dirawat dengan baik; sehingga mobil itu cepat rusak. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Makmur bahwa setelah beberapa kali menghubungi CV Adi Putra Bungsu sebagai penanggung jawab mobil tersebut, ia tidak mendapat tanggapan yang memuaskan.

Selanjutnya penggunaan stereotip juga ditemukan pada kutipan teks berita di bawah ini. Teks berita ini diterbitkan oleh *Merangin Ekspres* dengan judul *Berkenalan Lewat Facebook, Siswi SD ini Dicabuli di Kebun Sawit*.

Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali ini menimpa DW (14) Warga Koto Jati, Kecamatan Tabir, yang masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar (SD). DW diperkosa oleh seorang lelaki berumur 34 tahun, berinisial ML warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir. *Kejadian ini bermula saat DW berkenalan dengan ML lewat jejaring sosial Facebook. Keduanya sering melakukan chatting, hingga kemudian bertukar nomor hand phone (HP). Hubungan pasangan yang terpaat usia 20 tahun ini, semakin dekat setelah ML sering menelpon DW. Meski belum pernah ketemu tapi keduanya sudah layaknya orang saling pacaran.* Hingga pada Selasa malam (21/4), ML mendatangi rumah korban untuk mengajak bertemu. DW yang tidak menaruh curiga kemudian menemui ML. Bahkan DW juga tidak menolak saat diajak oleh ML untuk jalan jalan.

Kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan wacana stereotip. Deskripsi tentang pelaku sosial DW sebagai korban justru menimbulkan konotasi negatif. Melalui deskripsi tersebut, masyarakat memperoleh gambaran bahwa terjadinya peristiwa pencabulan ini karena DW sejak awal memberikan kesempatan pada pelaku ML untuk mendekati dirinya. Karena DW masih di bawah umur, seharusnya ia mengetahui bahayanya jika berkenalan dengan orang asing melalui jejaring sosial mengingat bahwa sering terjadinya kasus kekerasan seksual berawal dari perkenalan di jejaring sosial. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pembaca akan lebih menyalahkan DW, terutama keluarganya. Seharusnya, kedua orangtua lebih memerhatikan lingkungan pergaulan anaknya dan tidak memberi izin kepada anak yang masih di bawah umur untuk pergi sendirian apalagi ditemani orang yang tidak dikenal keluarga.

### **Strategi Misrepresentasi Kategori Delegitimasi**

Delegitimasi berhubungan dengan apakah seseorang merasa absah, merasa benar, dan mempunyai dasar pembenar tertentu ketika melakukan suatu tindakan. Berikut contoh teks berita yang menggunakan strategi ini.

Bukan hanya tuntutan untuk kesejahteraan pekerja saja, namun nama perusahaan juga ikut dipersoalkan. ***Sebab, pekerja ingin kejelasan status perusahaannya. "Nama perusahaan juga kami bingung, sebab kami ini ikut perusahaan yang mana dulu PT JAW malah saat ini menjadi PT Primatama Kerasimas, sementara yang EMAL menjadi PT Bahasa Karya Semesta, ini yang membuat kami bingung sebab tidak ada papan logo perusahaan" ujarnya lagi.***

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar *Radar Sarko* dengan judul berita *Dewan Dilantik, Aktivis Demo*. Delegitimasi diungkapkan melalui teks berita di atas bahwa pelaku sosial yang dianggap tidak sah adalah sebuah perusahaan swasta yang sampai saat ini tidak jelas statusnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan sering digantinya nama perusahaan dan tidak adanya bukti fisik yakni papan logo sebagai identitas sebuah perusahaan. Akibatnya, legalitas perusahaan tersebut diragukan oleh karyawannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada empat simpulan yang dapat ditarik. *Pertama*, terdapat praktik wacana penggunaan misrepresentasi dalam teks berita pada surat kabar *Radar Sarko* Edisi Maret - September 2014 dan *Merangin Ekspres* Edisi Maret - Mei 2015. Dari 34 judul teks berita pada surat kabar *Radar Sarko* ditemukan 81 data penggunaan strategi misrepresentasi yang berbeda. Selanjutnya dalam penggunaan strategi marjinalisasi disfemisme ditemukan 11 data. Pada surat kabar *Merangin Ekspres*, dari 131 judul berita diidentifikasi 57 data. Dalam praktiknya, misrepresentasi yang sering terjadi dalam teks berita adalah marjinalisasi kategori eufemisme, sedangkan yang sedikit ditemukan adalah delegitimasi.

*Kedua*, dalam proses analisis data penggunaan strategi misrepresentasi pada teks berita dalam surat kabar *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres*, terdapat dua praktik wacana dari kategori marjinalisasi yang bertentangan dengan pendapat Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Dua praktik wacana tersebut adalah disfemisme dan labelisasi.

*Ketiga*, temuan Eriyanto bahwa praktik wacana disfemisme banyak digunakan untuk menyebutkan tindakan yang dilakukan masyarakat bawah dan praktik wacana labelisasi digunakan oleh mereka yang berada di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawannya terbantahkan melalui hasil penelitian ini karena dalam surat kabar *Radar Sarko* dan *Merangin Ekspres* praktik wacana tersebut seringkali digunakan sebaliknya. *Keempat*, dalam menyampaikan informasi melalui teks berita, seringkali terjadi misrepresentasi ketika menggambarkan pelaku sosial yang menjadi subjek pemberitaan. Hal tersebut sering terjadi tanpa disadari oleh jurnalis, mengingat sebagian besar jurnalis kedua surat kabar tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik. [ ]

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, Ngusman. 2010. *Sintaksis: Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia*. Padang: Sukabina.
- Andre Yuris, Yulianus. 2009. *Studi Analisis Wacana Kritis*. <http://andreyuris.wordpress.com>.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Diidonesiakan oleh I.Soetikno. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: Refika Aditama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Finoza, Lamuddin. 2002. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Irene, Diana. 2007. *Analisis Media Kippas*. <http://kippas.wordpress.com>.
- Krippendorff, Klaus. 1980. *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. London: SAGE.

- \_\_\_\_\_.1991. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Diterjemahkan Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2009. *Referensi Penelitian Kualitatif*. <http://mulyono.staff.uns.ac.id>.
- Nadya Abrar, Ana. 2005. *Penulisan Berita. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yurnaldi. 2004. *Menjadi Wartawan Hebat*. Padang: Citra Buana Indonesia.

# Petunjuk bagi (Calon) Penulis

## **Lingua Humaniora**

1. Artikel yang ditulis untuk LINGUA HUMANIORA meliputi hasil penelitian atau hasil telaah konseptual bidang pendidikan bahasa dan linguistik. Naskah diketik dengan huruf Trebuchet MS, ukuran 12 pts, dengan spasi At least 12 pts sepanjang lebih kurang 15 halaman. Berkas (*file*) dalam format Microsoft Word dan dikirim via surel ke alamat *lingua.humaniora.p4tkbahasa@gmail.com*.
2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat surel untuk memudahkan komunikasi.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai dengan judul pada setiap bagian artikel, kecuali pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar di tengah-tengah, dengan huruf sebesar 14 poin. Peringkat judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul bagian dan subbagian dicetak tebal atau tebal dan miring), dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian.  
PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, TEBAL, RATA TEPI KIRI)  
Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri)  
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Tebal-Miring, Rata Tepi Kiri)
4. Sistematika artikel hasil telaah konseptual (pemikiran) adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa subbagian); penutup atau simpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang; metode; hasil dan bahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
6. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
7. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh (Davis, 2003: 47).
8. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.  
  
Buku:  
Anderson, D. W. , Vault, V. D. & Dickson, C. E. 1999. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co  
  
Buku kumpulan artikel:  
Saukah, A. & Waseso, M. G. (Eds. ). 2002. "Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah" (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press.  
  
Artikel dalam buku kumpulan artikel:  
Russel, T. 1998. "An Alternative Conception: Representing Representation". Dalam P. J. Black & A. Lucas (Eds. ), *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge. ge.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Kansil, C. L. 2002. "Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri". *Transpor*, XX(4): 57-61.

Artikel dalam koran:

Pitunov, B. 13 Desember, 2002. "Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan?". *Majalah Pos*, hlm. 4&11.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang):

*Jawa Pos*. 22 April 1995. "Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri". hlm. 3.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 190. Jakarta: Armas Duta Jaya. a.

Buku terjemahan:

Ary, D. , Jacobs, L. C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Kuncoro, T. 1996. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan Bangunan, Program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia Usaha dan Jasa Konstruksi*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Waseso, M. G. 2001. "Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat". Banjarmasin, 9-11 Agustus.

Internet (karya individual):

Hitchcock, S. , Carr, L. & Hall, W. 1996. *A Survey of STM Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm*. (online), (<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi. 1998. "Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*". (online), jilid 5, No. 4, (<http://www.malang.ac.id>).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 1995. "Summary of Citing Internet Sites". NETTRAIN Discussion List. (online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu).

Internet (surel pribadi):

Naga, D. S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 1997. Artikel untuk JIP. Surel kepada Ali Saukah (jippsi@mlg.ywcn.or.id).

9. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris menggunakan ragam baku.
10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya, penulis artikel diberikan kesempatan untuk melakukan revisi naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis.
11. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dikerjakan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam bentuk cetak-coba dapat dibatalkan pemuatannya oleh penyunting jika diketahui bermasalah.
12. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan peranti lunak komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang berkaitan dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.